



SALINAN

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Reklame merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang sangat diperlukan untuk mendukung kemandirian daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame di Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Demak.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pajak daerah.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu baik barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati umum.
10. Papan Reklame adalah media informasi berupa promosi luar ruang berfungsi untuk menjajakan suatu produk baik berupa barang maupun jasa, sehingga dari pemasangan reklame berharap suatu produk barang dan/atau jasa dapat dikenal oleh konsumen atau masyarakat luas.
11. Panggung/lokasi Reklame adalah sesuatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah Reklame.
12. Penyelenggara reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya.
13. Kawasan/zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk pemasangan Reklame.
14. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disebut NJOPR adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik atau penyelenggara Reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan Reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perbaikan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah diizinkan.
15. Nilai Strategis Reklame adalah ukuran nilai jual atau harga yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan, pemanfaatan tata ruang daerah untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.
16. Nilai Sewa Reklame, yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang dihasilkan dari penjumlahan nilai strategis reklame dan nilai jual objek pajak reklame ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
17. Reklame Permanen adalah reklame yang diselenggarakan secara tetap dan bahan baku yang digunakan dapat bertahan lebih dari 1 (satu) tahun.
18. Reklame Insidental adalah penyelenggaraan reklame yang bersifat sementara dan tidak tetap serta bahan baku yang digunakan tidak dapat bertahan lama.

19. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk di dalamnya *Videotron* dan *Large Electronic Display*.
20. Reklame Papan atau *Billboard* adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari kayu, seng, *tinplate*, *colibrite*, *vynil*, alumunium, *fiberglass*, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
21. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan dan/atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor maupun tidak.
22. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain yang dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu *event* atau kegiatan yang bersifat insidental.
23. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu *event* dan/atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis, termasuk didalamnya spanduk, umbul-umbul, bendera, *flag chain* (rangkaiian bendera), tenda, *krey*, *banner*, *giant banner* dan *standing banner*.
24. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan dan/atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk didalamnya adalah brosur, leaflet dan reklame dalam undangan.
25. Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
26. Reklame Film atau *Slide* adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan *klise* (*celuloide*) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
27. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.

28. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
29. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
30. Surat Tanda Setoran atau Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STS/SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke kas daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terhutang.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
33. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
34. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
35. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
36. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

## BAB II OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

### Pasal 2

- (1) Objek Pajak merupakan semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat / stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;

- f. Reklame udara;
  - g. Reklame suara;
  - h. Reklame film/slide; dan
  - i. Reklame peragaan.
- (3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi dengan ketentuan tidak melebihi ukuran 1 m<sup>2</sup> (Satu meter persegi);
  - d. tulisan atau benda yang dipasang semata-mata untuk menjamin keselamatan umum sepanjang tanpa adanya pesan sponsor;
  - e. penyelenggaraan Reklame oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah;
  - f. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum yaitu untuk pemilihan calon anggota Legislatif, pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah, pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati; dan
  - g. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa.

### Pasal 3

- (1) Subjek Pajak merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan tersebut.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, wajib pajak merupakan pihak ketiga tersebut.

BAB III  
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN  
PAJAK

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan Pajak adalah NSR.
- (2) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan atas:
  - a. NJOPR; dan
  - b. nilai Sewa Pemasangan Reklame.
- (3) NJOPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung dengan memperhatikan faktor biaya pembuatan, biaya pemasangan, biaya pemeliharaan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, ukuran dan jenis Reklame.
- (4) Nilai Sewa Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditentukan dalam pembagian rayon dengan memperhatikan letak/lokasi tanah penempatannya.
- (5) Simulasi hasil perhitungan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Pajak Reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pembagian rayon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) yaitu:

- a. rayon A merupakan zona kendali ketat yang meliputi Wilayah dalam kota dan sekitarnya termasuk jalan lingkaran kota Demak, wilayah jalan raya Mranggen termasuk wilayah Batusari dan Pucang Gading Kecamatan Mranggen;
- b. Rayon B merupakan zona kendali sedang yang meliputi wilayah sepanjang Jalan Nasional/Pantura di Kabupaten Demak (jalan raya Sayung sampai dengan batas kota Demak/Katonsari, jalan raya Karanganyar sampai dengan batas kota Demak/Jebor), sepanjang jalan raya Karangawen-Purwodadi;
- c. rayon C merupakan zona kendali rendah yang meliputi wilayah sepanjang jalan Kabupaten dan jalan Desa di Kabupaten Demak; dan
- d. rayon D merupakan zona kendali khusus yang meliputi wilayah sepanjang jalan Sultan Fatah, jalan Sultan Hadiwijaya, jalan Pemuda dan jalan Bayangkara Baru, sepanjang Jalan Tol dan Rest Area Jalan Tol.

## Pasal 6

- (1) Cara menghitung ukuran Reklame sebagai berikut:
  - a. Reklame yang mempunyai bingkai atau batas dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf tersebut berada di dalamnya;
  - b. Reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai, dihitung dari gambar kalimat atau huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horizontal, sehingga merupakan empat persegi; dan
  - c. Reklame yang berbentuk benda/bangun, dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk benda/bangun masing-masing.
- (2) Dalam menghitung Pajak maka bagian yang kurang dari 0,5 m<sup>2</sup> (nol koma lima meter persegi) dihitung 0,5 m<sup>2</sup> (nol koma lima meter persegi).

## Pasal 7

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

## Pasal 8

- (1) Besaran pokok Pajak yang harus dibayar oleh wajib Pajak (PR) dihitung dengan cara perkalian antara ukuran/luas media Reklame (L), Nilai Sewa Reklame (NSR), dan tarif Pajak.
- (2) Penghitungan besarnya Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan rumus:

$$PR = L \times NSR \times 25\%$$

## BAB IV

### MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANG PAJAK

## Pasal 9

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame yang ditentukan sebagai berikut:

- a. dalam hal Reklame diselenggarakan secara permanen, masa Pajak ditetapkan waktu yang lamanya 1 (satu) tahun; dan
- b. dalam hal Reklame diselenggarakan dalam waktu terbatas dikategorikan sebagai Reklame insidentil, masa Pajak ditetapkan 1 (satu) bulan, 1 (satu) minggu atau 1 (satu) hari.

## Pasal 10

Pajak yang terutang terjadi pada saat penyelenggaraan Reklame atau sejak diterbitkan SKPD.

## BAB V PENETAPAN PAJAK

### Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran

## Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Pajak yang baru wajib mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya kepada Bupati melalui BPKPAD dengan menggunakan formulir pendaftaran Wajib Pajak atau sejenisnya.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diisi dengan benar, jelas dan lengkap oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dilengkapi data Reklame yang diperlukan dalam perhitungan Pajak.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud ayat (2), diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.

### Bagian Kedua Tata Cara Penerbitan SKPD dan STPD

## Pasal 12

- (1) Bupati mendelegasikan wewenang dalam menerbitkan SKPD kepada Kepala BPKPAD.
- (2) Kepala BPKPAD menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD berdasarkan Nota Perhitungan Pajak atau dokumen lain.
- (3) SKPD ditandatangani oleh Kepala Bidang Pendapatan atas nama Kepala BPKPAD.

## Pasal 13

BPKPAD atas nama Bupati menerbitkan STPD jika:

- a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran Pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

#### Pasal 14

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak.
- (2) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

### BAB VI

#### TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

##### Bagian Kesatu

##### Tata Cara Pembayaran

#### Pasal 15

- (1) Pembayaran Pajak terutang dapat dilakukan melalui Bank Persepsi atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Apabila pembayaran oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan melalui Bendahara Penerimaan, Petugas Pajak, atau tempat lain yang ditunjuk dalam jangka waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam harus disetorkan ke rekening kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan STS/SSPD, SKPD, STPD, atau dokumen lain yang dipersamakan serta harus dibayar lunas.
- (4) Pajak terutang dalam SKPD atau STPD wajib dibayar paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkan.
- (5) Pajak terutang dalam SKPD atau STPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) sebulan dan ditagih dengan STPD.
- (6) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.

##### Bagian Kedua

##### Tata Cara Penagihan

#### Pasal 16

- (1) Tahapan pelaksanaan penagihan Pajak terutang yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran diatur sebagai berikut:

- a. Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKPD, STPD, surat pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding;
  - b. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah Surat Teguran, atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak terutang;
  - c. Surat Teguran, atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan sebanyak 3 (tiga) kali; dan
  - d. Dalam hal jumlah Pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Kepala BPKPAD menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Pelaksanaan penagihan Pajak dengan Surat Paksa tidak mengakibatkan penundaan Hak Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak serta mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.
  - (4) Dalam hal Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Paksa, Kepala BPKPAD segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

#### Pasal 17

- (1) Penagihan Pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), apabila:
  - a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
  - b. Wajib Pajak memindahkan Barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;

- c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya atau memekarkan usahanya atau memindahtangankan perusahaannya yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya; atau
  - d. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak oleh pihak ketiga, atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Kepala BPKPAD menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan Pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan situasi dan kondisi Daerah.

BAB VIII  
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN,  
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI  
ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat membetulkan STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat:
- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan Pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
  - b. mengurangi atau menambahkan STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
  - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
  - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
  - e. mengurangi ketetapan Pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek Pajak.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan yang membidangi perpajakan, dengan alasan yang jelas;

- b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengkajian dan penelitian;
- c. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan tagihan Pajak ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. paling lambat 3 (tiga) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak; dan
- e. apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Bupati atau pejabat yang ditunjuk belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dianggap dikabulkan.

## BAB IX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

### Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X  
PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan Reklame dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keamanan, keselamatan, kebersihan dan keindahan, dengan cara:
  - a. melakukan perawatan dan pemeliharaan secara rutin;
  - b. segera melakukan perbaikan terhadap Reklame yang rusak yang keberadaannya mengganggu keamanan dan keselamatan serta mengganggu kebersihan dan keindahan; dan
  - c. segera mencabut, membongkar, menurunkan dan menghentikan Reklame apabila:
    1. telah habis masa pajaknya dan tidak diperpanjang; atau
    2. diperintahkan oleh Pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten sehubungan dengan adanya kepentingan Pemerintah, kepentingan umum atau hal lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
- (2) Penyelenggara Reklame tidak diperbolehkan:
  - a. memasang Reklame yang keberadaannya mengganggu/menghalangi pandangan rambu-rambu atau pengatur lalu lintas;
  - b. memasang Reklame di tiang listrik, tiang telepon dan atau fasilitas umum lainnya, serta di pohon penghijauan dengan dipaku;
  - c. memasang Reklame di kawasan alun-alun dalam radius 25 (dua puluh lima) meter dari garis lingkaran luar alun-alun; dan
  - d. pelanggaran pemasangan lainnya yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Penyelenggara Reklame bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala akibat yang ditimbulkan karena kegagalan konstruksi ataupun sebab lain sehingga menimbulkan kerugian terhadap pihak lain.

BAB XI  
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN

Pasal 22

- (1) Pengawasan, pengendalian dan penertiban penyelenggaraan Reklame dilakukan untuk menguji kepatuhan penyelenggara Reklame dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

- (2) Pengawasan, pengendalian dan Penertiban penyelenggaraan Reklame dilakukan oleh tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penertiban Reklame dilakukan apabila penyelenggara Reklame tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (4) Dalam hal penyelenggara Reklame tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati berwenang menertibkan Reklame beserta bangunan Reklame menjadi aset Pemerintah Daerah.
- (5) Penertiban Reklame sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan oleh Tim Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban.
- (6) Dalam hal penertiban tidak bisa dilakukan karena keterbatasan peralatan dan sebagainya, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan pembongkaran.
- (7) Reklame yang dibongkar selanjutnya dimusnahkan, dijual atau menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (8) Dalam melaksanakan pemusnahan dan/atau penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan berita acara.
- (9) Hasil dari penjualan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disetorkan ke Kas Daerah sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 23

- (1) Pemungutan Pajak yang masih dalam proses atau dilakukan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, dikenakan berdasarkan Peraturan Bupati yang lama.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Reklame, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 17 September 2024

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 17 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024 NOMOR 42

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Plt. Kepala Bagian Hukum

Setda Kabupaten Demak



Kennia Irtani, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007081995032003

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 42 TAHUN 2024  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK  
REKLAME DI DAERAH

No	JENIS REKLAME	SUDUT PANDANG	NJOPR	NSPR				FPS	NSR				PAJAK 25 %				SATUAN	MASA PAJAK
				RAYON A	RAYON B	RAYON C	RAYON D		RAYON A	RAYON B	RAYON C	RAYON D	RAYON A	RAYON B	RAYON C	RAYON D		
1	2	3	4	5	6	7	8	13	9	10	11	12	18	19	20	21	22	23
A. REKLAME PERMANEN PRODUK ROKOK																		
1	Bando Jalan	1	1,350,000	400,000	300,000	200,000	450,000	1.50	2,625,000	2,475,000	2,325,000	2,700,000	656,250	618,750	581,250	675,000	m <sup>2</sup>	1 Tahun
		2	2,700,000	800,000	600,000	400,000	900,000	1.50	5,250,000	4,950,000	4,650,000	5,400,000	1,312,500	1,237,500	1,162,500	1,350,000	m <sup>2</sup>	1 Tahun
2	Megatron, Videotron dan Large Electronic Display	1	9,000,000	400,000	300,000	200,000	450,000	1.50	14,100,000	13,950,000	13,800,000	14,175,000	3,525,000	3,487,500	3,450,000	3,543,750	m <sup>2</sup>	1 Tahun
		2	13,500,000	800,000	600,000	400,000	900,000	1.50	21,450,000	21,150,000	20,850,000	21,600,000	5,362,500	5,287,500	5,212,500	5,400,000	m <sup>2</sup>	1 Tahun
3	Display Board	1	2,000,000	400,000	300,000	200,000	450,000	1.50	3,600,000	3,450,000	3,300,000	3,675,000	900,000	862,500	825,000	918,750	m <sup>2</sup>	1 Tahun
		2	3,000,000	800,000	600,000	400,000	900,000	1.50	5,700,000	5,400,000	5,100,000	5,850,000	1,425,000	1,350,000	1,275,000	1,462,500	m <sup>2</sup>	1 Tahun
4	Papan Nama Tiang Bersinar	1	675,000	400,000	300,000	200,000	450,000	1.50	1,612,500	1,462,500	1,312,500	1,687,500	403,125	365,625	328,125	421,875	m <sup>2</sup>	1 Tahun
		2	975,000	800,000	600,000	400,000	900,000	1.50	2,662,500	2,362,500	2,062,500	2,812,500	665,625	590,625	515,625	703,125	m <sup>2</sup>	1 Tahun
		> 2	1,275,000	1,200,000	900,000	600,000	1,350,000	1.50	3,712,500	3,262,500	2,812,500	3,937,500	928,125	815,625	703,125	984,375	m <sup>2</sup>	1 Tahun
5	Papan Nama Tiang	1	450,000	400,000	300,000	200,000	450,000	1.50	1,275,000	1,125,000	975,000	1,350,000	318,750	281,250	243,750	337,500	m <sup>2</sup>	1 Tahun
		2	650,000	800,000	600,000	400,000	900,000	1.50	2,175,000	1,875,000	1,575,000	2,325,000	543,750	468,750	393,750	581,250	m <sup>2</sup>	1 Tahun
		> 2	850,000	1,200,000	900,000	600,000	1,350,000	1.50	3,075,000	2,625,000	2,175,000	3,300,000	768,750	656,250	543,750	825,000	m <sup>2</sup>	1 Tahun
6	Papan Nama Toko Bersinar	1	75,000	300,000	250,000	200,000	325,000	1.50	562,500	487,500	412,500	600,000	140,625	121,875	103,125	150,000	m <sup>2</sup>	1 Tahun
7	Papan Nama Toko	1	50,000	300,000	250,000	200,000	325,000	1.50	525,000	450,000	375,000	562,500	131,250	112,500	93,750	140,625	m <sup>2</sup>	1 Tahun
8	Reklame Tembok	1	50,000	300,000	250,000	200,000	325,000	1.50	525,000	450,000	375,000	562,500	131,250	112,500	93,750	140,625	m <sup>2</sup>	1 Tahun
9	Rombong	1	450,000	300,000	250,000	200,000	325,000	1.50	1,125,000	1,050,000	975,000	1,162,500	281,250	262,500	243,750	290,625	m <sup>2</sup>	1 Tahun
10	Tinplate	1	50,000	300,000	250,000	200,000	325,000	1.50	525,000	450,000	375,000	562,500	131,250	112,500	93,750	140,625	m <sup>2</sup>	1 Tahun
11	Kendaraan	1	100,000	300,000	250,000	200,000	325,000	1.50	600,000	525,000	450,000	637,500	150,000	131,250	112,500	159,375	m <sup>2</sup>	1 Tahun

No	JENIS REKLAME	SUDUT PANDANG	NJOPR	NSPR				FPS	NSR				PAJAK 25 %				SATUAN	MASA PAJAK
				RAYON A	RAYON B	RAYON C	RAYON D		RAYON A	RAYON B	RAYON C	RAYON D	RAYON A	RAYON B	RAYON C	RAYON D		
1	2	3	4	5	6	7	8	13	9	10	11	12	18	19	20	21	22	23
B. REKLAME PERMANEN PRODUK NON ROKOK																		
1	Bando Jalan	1	1,350,000	400,000	300,000	200,000	450,000	1.00	1,750,000	1,650,000	1,550,000	1,800,000	437,500	412,500	387,500	450,000	m <sup>2</sup>	1 Tahun
		2	2,700,000	800,000	600,000	400,000	900,000	1.00	3,500,000	3,300,000	3,100,000	3,600,000	875,000	825,000	775,000	900,000	m <sup>2</sup>	1 Tahun
2	Megatron, Videotron dan Large Electronic Display	1	9,000,000	400,000	300,000	200,000	450,000	1.00	9,400,000	9,300,000	9,200,000	9,450,000	2,350,000	2,325,000	2,300,000	2,362,500	m <sup>2</sup>	1 Tahun
		2	13,500,000	800,000	600,000	400,000	900,000	1.00	14,300,000	14,100,000	13,900,000	14,400,000	3,575,000	3,525,000	3,475,000	3,600,000	m <sup>2</sup>	1 Tahun
3	Display Board	1	2,000,000	400,000	300,000	200,000	450,000	1.00	2,400,000	2,300,000	2,200,000	2,450,000	600,000	575,000	550,000	612,500	m <sup>2</sup>	1 Tahun
		2	3,000,000	800,000	600,000	400,000	900,000	1.00	3,800,000	3,600,000	3,400,000	3,900,000	950,000	900,000	850,000	975,000	m <sup>2</sup>	1 Tahun
4	Papan Nama Tiang Bersinar	1	675,000	400,000	300,000	200,000	450,000	1.00	1,075,000	975,000	875,000	1,125,000	268,750	243,750	218,750	281,250	m <sup>2</sup>	1 Tahun
		2	975,000	800,000	600,000	400,000	900,000	1.00	1,775,000	1,575,000	1,375,000	1,875,000	443,750	393,750	343,750	468,750	m <sup>2</sup>	1 Tahun
		> 2	1,275,000	1,200,000	900,000	600,000	1,350,000	1.00	2,475,000	2,175,000	1,875,000	2,625,000	618,750	543,750	468,750	656,250	m <sup>2</sup>	1 Tahun
5	Papan Nama Tiang	1	450,000	400,000	300,000	200,000	450,000	1.00	850,000	750,000	650,000	900,000	212,500	187,500	162,500	225,000	m <sup>2</sup>	1 Tahun
		2	650,000	800,000	600,000	400,000	900,000	1.00	1,450,000	1,250,000	1,050,000	1,550,000	362,500	312,500	262,500	387,500	m <sup>2</sup>	1 Tahun
		> 2	850,000	1,200,000	900,000	600,000	1,350,000	1.00	2,050,000	1,750,000	1,450,000	2,200,000	512,500	437,500	362,500	550,000	m <sup>2</sup>	1 Tahun
6	Papan Nama Toko Bersinar	1	75,000	300,000	250,000	200,000	325,000	1.00	375,000	325,000	275,000	400,000	93,750	81,250	68,750	100,000	m <sup>2</sup>	1 Tahun
7	Papan Nama Toko	1	50,000	300,000	250,000	200,000	325,000	1.00	350,000	300,000	250,000	375,000	87,500	75,000	62,500	93,750	m <sup>2</sup>	1 Tahun
8	Reklame Tembok	1	50,000	300,000	250,000	200,000	325,000	1.00	350,000	300,000	250,000	375,000	87,500	75,000	62,500	93,750	m <sup>2</sup>	1 Tahun
9	Rombong	1	450,000	300,000	250,000	200,000	325,000	1.00	750,000	700,000	650,000	775,000	187,500	175,000	162,500	193,750	m <sup>2</sup>	1 Tahun
10	Tinplate	1	50,000	300,000	250,000	200,000	325,000	1.00	350,000	300,000	250,000	375,000	87,500	75,000	62,500	93,750	m <sup>2</sup>	1 Tahun
11	Kendaraan	1	100,000	300,000	250,000	200,000	325,000	1.00	400,000	350,000	300,000	425,000	100,000	87,500	75,000	106,250	m <sup>2</sup>	1 Tahun

No	JENIS REKLAME	SUDUT PANDANG	NJOPR	NSPR				FPS	NSR				PAJAK 25 %				SATUAN	MASA PAJAK
				RAYON A	RAYON B	RAYON C	RAYON D		RAYON A	RAYON B	RAYON C	RAYON D	RAYON A	RAYON B	RAYON C	RAYON D		
1	2	3	4	5	6	7	8	13	9	10	11	12	18	19	20	21	22	23
C. REKLAME INSIDENTIL PRODUK ROKOK																		
1	Kain / Spanduk / Umbul Umbul	1	15,000	5,000	4,000	3,000	5,400	1.50	30,000	28,500	27,000	30,600	7,500	7,125	6,750	7,650	m <sup>2</sup>	Harian
2	Kain / Spanduk / Umbul Umbul	1	15,000	25,000	20,000	15,000	27,000	1.50	60,000	52,500	45,000	63,000	15,000	13,125	11,250	15,750	m <sup>2</sup>	Mingguan
3	Kain / Spanduk / Umbul Umbul	1	15,000	90,000	70,000	50,000	100,000	1.50	157,500	127,500	97,500	172,500	39,375	31,875	24,375	43,125	m <sup>2</sup>	Bulanan
4	Baliho /Papan	1	70,000	90,000	70,000	50,000	100,000	1.50	240,000	210,000	180,000	255,000	60,000	52,500	45,000	63,750	m <sup>2</sup>	Bulanan
5	Plastik	1	5,000	4,000	3,000	2,000	5,000	1.50	13,500	12,000	10,500	15,000	3,375	3,000	2,625	3,750	per lbr	Bulanan
6	Kertas	1	200	1,000	800	600	1,200	1.50	1,800	1,500	1,200	2,100	450	375	300	525	per lbr	Bulanan
7	Reklame Film/Slide	1	50,000	90,000	70,000	50,000	100,000	1.50	210,000	180,000	150,000	225,000	52,500	45,000	37,500	56,250	per hari	Bulanan
8	Reklame Suara	1	40,000	4,000	3,000	2,000	4,200	1.50	66,000	64,500	63,000	66,300	16,500	16,125	15,750	16,575	per hari	Bulanan
9	Reklame Udara	1	100,000	90,000	70,000	50,000	100,000	1.50	285,000	255,000	225,000	300,000	71,250	63,750	56,250	75,000	per hari	Bulanan
10	Reklame Peragaan	1	175,000	90,000	70,000	50,000	100,000	1.50	397,500	367,500	337,500	412,500	99,375	91,875	84,375	103,125	per hari	Bulanan

No	JENIS REKLAME	SUDUT PANDANG	NJOPR	NSPR				FPS	NSR				PAJAK 25 %				SATUAN	MASA PAJAK
				RAYON A	RAYON B	RAYON C	RAYON D		RAYON A	RAYON B	RAYON C	RAYON D	RAYON A	RAYON B	RAYON C	RAYON D		
1	2	3	4	5	6	7	8	13	9	10	11	12	18	19	20	21	22	23
C. REKLAME INSIDENTIL PRODUK NON ROKOK																		
1	Kain / Spanduk / Umbul Umbul	1	15,000	5,000	4,000	3,000	5,400	1.00	20,000	19,000	18,000	20,400	5,000	4,750	4,500	5,100	m <sup>2</sup>	Harian
2	Kain / Spanduk / Umbul Umbul	1	15,000	25,000	20,000	15,000	27,000	1.00	40,000	35,000	30,000	42,000	10,000	8,750	7,500	10,500	m <sup>2</sup>	Mingguan
3	Kain / Spanduk / Umbul Umbul	1	15,000	90,000	70,000	50,000	100,000	1.00	105,000	85,000	65,000	115,000	26,250	21,250	16,250	28,750	m <sup>2</sup>	Bulanan
4	Baliho /Papan	1	70,000	90,000	70,000	50,000	100,000	1.00	160,000	140,000	120,000	170,000	40,000	35,000	30,000	42,500	m <sup>2</sup>	Bulanan
5	Plastik	1	5,000	4,000	3,000	2,000	5,000	1.00	9,000	8,000	7,000	10,000	2,250	2,000	1,750	2,500	per lbr	Bulanan
6	Kertas	1	200	1,000	800	600	1,200	1.00	1,200	1,000	800	1,400	300	250	200	350	per lbr	Bulanan
7	Reklame Film/Slide	1	50,000	90,000	70,000	50,000	100,000	1.00	140,000	120,000	100,000	150,000	35,000	30,000	25,000	37,500	per hari	Bulanan
8	Reklame Suara	1	40,000	4,000	3,000	2,000	4,200	1.00	44,000	43,000	42,000	44,200	11,000	10,750	10,500	11,050	per hari	Bulanan

9	Reklame Udara	1	100,000	90,000	70,000	50,000	100,000	1.00	190,000	170,000	150,000	200,000	47,500	42,500	37,500	50,000	per hari	Bulanan
10	Reklame Peragaan	1	175,000	90,000	70,000	50,000	100,000	1.00	265,000	245,000	225,000	275,000	66,250	61,250	56,250	68,750	per hari	Bulanan

Ket :

NJOPR : Nilai Jual Obyek Pajak Reklame  
NSPR : Nilai Strategis Pemasangan Reklame  
NSR : Nilai Sewa Reklame  
FPS : Faktor Penyesuai Sewa

BUPATI DEMAK,  
TTD  
EISTI'ANAH